

Bahagia Berlipat Pemanah Diananda Raih Emas SEA Games 2025

Pemanah Indonesia, Diananda Choirunisa berhasil meraih emas saat melawan pemanah Vietnam, Huyen Diep Trieu, pada final nomor panahan Recurve perorangan Putri SEA Games 2025 di Football Field 1, Sport Authority of Thailand, Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok, Thailand, Rabu (17/12/2025). Torehan ini kian spesial karena pemanah asal Surabaya ini ternyata tengah mengandung anak keduanya. Terhitung pukul 19.40 WIB, Tim Merah Putih tetap berada di posisi kedua perolehan medali sementara di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Indonesia kini mengoleksi 72 medali emas, 84 perak, dan 90 perunggu dengan total 246 medali. (ist.antara)

BOLA PANAS UPAH BURUH DI TANGAN GUBERNUR

Buruh Ancam Demo Berjilid-jilid

Penentuan besaran upah buruh kini memasuki titik paling menentukan. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, memilih mundur dari garis depan penetapan upah minimum dan menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada kepala daerah. Presiden Prabowo Subianto menyetujui skema ini, dengan memberi ruang bagi gubernur untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sesuai kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup di masing-masing daerah. Di tingkat daerah, keputusan itu tak datang tanpa tekanan. Serikat buruh terus mendorong kenaikan upah yang dinilai lebih adil, sementara pelaku usaha mengingatkan soal kemampuan dunia usaha menanggung beban biaya produksi. Tarik-menarik kepentingan inilah yang kini mengiringi langkah para gubernur dalam mengambil keputusan. Berdasarkan hitungan kalangan buruh, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang baru hanya mencantumkan rentang indeks atau alfa 0,5 hingga 0,9 dalam formula UMP 2026. Jika batas tertinggi alfa 0,9 digunakan, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen pada kuartal III 2025 (year on year) dan inflasi 2,86 persen pada Oktober 2025 (year on year), maka rata-rata kenaikan upah minimum tahun depan berpotensi mencapai sekitar 7,3 persen. Pengusaha menyatakan akan mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Namun mereka juga mengingatkan, opsi penangguhan tetap terbuka sebagai langkah terakhir jika perusahaan benar-benar tidak mampu menanggung kenaikan tersebut. Sesuai ketentuan, gubernur diminta menetapkan besaran kenaikan upah minimum 2026 paling lambat 24 Desember 2025.

Jadwal Penetapan dan Pengumuman

- **Batas waktu:** Gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
- **Mulai berlaku:** UMP 2026 efektif 1 Januari 2026.
- **Skema kenaikan:** Tidak seragam nasional; berbeda tiap provinsi sesuai formula, berbeda dari 2025.
- **Perkiraan kenaikan:** Rata-rata nasional diprediksi 5,2–7,2%, bergantung pilihan nilai alfa daerah.

Ketentuan Baru Nilai Alfa (α)

- **Perubahan utama:** Rentang nilai alfa diperlebar signifikan dibanding aturan lama.
- **Alfa 2026:** 0,5–0,9.
- **Aturan sebelumnya:** Hanya 0,1–0,3.
- **Penentuan:** Ditentukan melalui Dewan Pengupahan Daerah, mempertimbangkan kondisi ekonomi dan disparitas upah wilayah.

BACA HAL 11...

FORMULA UTAMA

PENGHITUNGAN UMP 2026

Penyesuaian nilai upah minimum dihitung dengan rumus:

$$\text{UMP 2026} = \text{Inflasi} + (\text{Pertumbuhan Ekonomi} \times \alpha)$$

Keterangan

- **Inflasi:** Mengacu pada data inflasi provinsi.
- **Pertumbuhan Ekonomi (PE):** Data pertumbuhan ekonomi di wilayah terkait.
- **Alfa (α):** Variabel indeks yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

5 PROVINSI DENGAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERTINGGI DI INDONESIA TAHUN 2025:

- DKI Jakarta
Rp 5.396.761
- Papua
Rp 4.285.850
- Bangka Belitung
Rp 3.876.600
- Sulawesi Utara
Rp 3.775.425
- Aceh
Rp 3.685.615

UPAH
BURUH

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyepakati masa transisi selama enam bulan agar masyarakat dan operator memiliki waktu untuk beradaptasi. Pada tahap awal, registrasi SIM card dengan verifikasi wajah masih bersifat sukarela. Pelanggan baru dapat memilih menggunakan metode lama berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), atau langsung menggunakan sistem biometrik.

Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir, menjelaskan bahwa mulai awal 2026 masyarakat memiliki dua jalur pendaftaran. Namun setelah masa transisi berakhir, seluruh registrasi SIM card baru akan sepenuhnya menggunakan verifikasi wajah dan tidak lagi memanfaatkan NIK serta KK.

"Aturan full biometrik akan berlaku mulai 1 Juli 2026. Sementara pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang," kata Marwan di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Registrasi nantinya dilakukan melalui aplikasi resmi yang disediakan masing-masing operator seluler. Bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta pengguna ponsel non-kamera atau feature phone, operator menyiapkan layanan bantuan melalui gerai atau outlet ritel dengan sistem berbasis web.

Kebijakan ini sejatinya bukan hal baru. Regulasi mengenai registrasi SIM

MULAI JULI 2026, REGISTRASI KARTU SIM WAJIB VERIFIKASI WAJAH

Pemerintah bersiap menerapkan sistem baru registrasi kartu SIM berbasis biometrik pengenalan wajah (face recognition). Langkah ini sebagai upaya menekan kejahatan digital dan merapikan data pelanggan seluler. Kebijakan ini akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2026, sebelum akhirnya diwajibkan penuh bagi pelanggan baru pada 1 Juli 2026.



(Ilustrasi) PT Angkasa Pura II (Persero) menyiapkan sistem pengenalan wajah (face recognition) dengan teknologi biometrik. Teknologi serupa akan dipakai untuk registrasi kartu SIM berbasis biometrik. (dok)

berbasis biometrik telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kominfo sejak April 2021. Namun implementasinya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan sistem operator. Sejumlah operator seperti Telkomsel dan XLSmart bahkan telah melakukan uji coba registrasi SIM card menggunakan pemindaian wajah.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa registrasi biometrik menjadi langkah strategis untuk memutus rantai kejahatan siber yang memanfaatkan nomor seluler. Menurutnya, hampir seluruh modus penipuan digital—mulai dari scam call, spoofing, smishing, hingga social

Daftar lima negara pengguna ponsel pintar terbanyak di dunia menurut Exploding Topics:



CINA:
jumlah pengguna ponsel pintar 974,69 juta, dengan populasi 1,43 miliar.



INDIA:
jumlah pengguna ponsel pintar 659 juta, dengan populasi 1,42 miliar.



AMERIKA SERIKAT:
jumlah pengguna ponsel pintar 276,14 juta, dengan populasi 338,28 juta.



INDONESIA:
jumlah pengguna ponsel pintar 187,7 juta, dengan populasi 275,5 juta.



BRASIL:
jumlah pengguna ponsel pintar 143,43 juta, dengan populasi 215,31 juta.

engineering--menjadikan nomor telepon sebagai pintu masuk utama.

"Kerugian akibat penipuan digital sudah melampaui Rp7 triliun. Setiap bulan terjadi lebih dari 30 juta panggilan penipuan, dan rata-rata masyarakat menerima setidaknya satu spam call setiap pekan," ujar Edwin.

Selain menekan kejahatan digital, sistem baru ini juga ditujukan untuk membersihkan basis data nomor seluler. Data Komdigi mencatat, hingga September 2025 terdapat lebih dari 332 juta pelanggan seluler tervalidasi, sementara jumlah penduduk dewasa Indonesia diperkirakan hanya sekitar 220 juta orang. Saat ini, lebih dari 310 juta nomor aktif beredar di masyarakat.

"Frekuensi seluler harus dimanfaatkan oleh pelanggan yang benar-benar sah, bukan oleh pelaku kejahatan digital," kata Edwin.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, operator seluler telah menjalin kerja sama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam pemanfaatan dan pemutakhiran data kependudukan. Dari sisi keamanan, sistem registrasi biometrik yang digunakan disebut telah memenuhi standar internasional, termasuk sertifikasi ISO 27001 untuk keamanan informasi serta standar liveness detection minimal ISO 30107-2 guna mencegah pemalsuan identitas. (wid,rls,dtc/dya)

Setumpuk Tantangan: Lansia, 3T, dan Keamanan

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) tetapkan registrasi SIM card dengan biometrik pengenalan wajah mulai 1 Juli 2026, namun sejumlah hambatan harus diantisipasi agar program ini berjalan lancar.

Pakar Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi, Alamsyah Saragih, menilai masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan secara serius sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menurut Alamsyah, biometrik memiliki risiko yang cukup besar. Biometrik bukanlah kata sandi yang bisa diganti apabila terjadi kebocoran data. Jika data biometrik bocor, risikonya bersifat seumur hidup.

"Ada tiga risiko yang harus diperhatikan bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi juga eksklusi sosial dan mission creep," ujarnya di acara talkshow bertajuk Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition yang digelar Komdigi di Jakarta, Rabu

(17/12/2025)

Mantan Komisioner Ombudsman RI periode 2016–2021 itu menambahkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses sistem biometrik. Keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di sejumlah daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kesiapan akses teknologi biometrik di Indonesia dinilai belum merata. Alamsyah mencontohkan potensi persoalan dalam kondisi darurat.

"Kalau ini tidak dimitigasi, ini akan jadi sumber keributan. Tidak kebayang misalnya ada bencana, handphone hilang, lalu orang harus pakai face recognition, tapi sistemnya belum jalan," katanya.

Untuk menghindari berbagai risiko tersebut, Alamsyah menyarankan pemerintah melakukan simulasi kebijakan dengan berbagai skenario kasus sebelum implementasi penuh

dilakukan. Simulasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menyiapkan solusi yang adil bagi seluruh masyarakat. Alamsyah juga menekankan pentingnya pembatasan tujuan penggunaan data biometrik secara tegas.

Menurutnya, tanpa pembatasan yang ketat, data biometrik yang awalnya digunakan untuk verifikasi kepemilikan SIM berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

"Kalau tidak ada pembatasan, niscaya bisa digunakan untuk yang lain. Mau tidak mau pemerintah harus membatasi dengan sangat ketat dan membangunnya bersama pihak-pihak lain," ujarnya.

Selain itu, jaminan hukum atas opsi non biometrik juga dinilai penting. Opsi ini diperlukan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu atau tidak memungkinkan menggunakan sistem biometrik, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Alamsyah menilai mitigasi harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan ini dijalankan. (wid,bis/dya)

DPR 'ELUS DADA' SOAL USULAN BGN AGAR SOPIR MBG BERKOSTUM POWER RANGERS

Sejumlah anggota DPR hanya bisa 'mengelus dada' menanggapi usulan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyarankan sopir kendaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengenakan kostum Power Rangers. Usulan tersebut dinilai tak lebih dari sekadar gimmick yang tak relevan, di tengah tantangan nyata distribusi dan kualitas program yang masih perlu banyak pembenahan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti usulan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang terkait sopir mobil pengantar menu Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai kostum Power Rangers. Ia meminta yang dipentingkan oleh BGN jangan hanya tampilan luar, tetapi fokus pada kualitas yang diberikan.

"Ya, segala upaya untuk membuat program itu sukses, saya kira baik ya. Tapi apakah itu hanya pakaian? Saya kira yang paling utama adalah bagaimana agar program ini betul-betul sesuai dengan harapan Pak Prabowo, betul-betul hadir untuk meningkatkan kualitas gizi dari anak-anak untuk kemudian bisa menghadirkan anak-anak kita dengan gizi yang baik," kata HNW di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

HNW mengatakan BGN jangan sampai menyederhanakan permasalahan dengan pakaian saja. Ia menyinggung kasus sopir mobil MBG yang menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 Pagi, Jakarta Utara.

"Jangan kemudian disederhanakan hanya dengan pakaian. Tapi kemudian ternyata nggak dibekali bekal menjadi sopir terjadilah kasus di Jakarta Utara, sopirnya bahkan cadangan dan menghadirkan penabrakan," ungkap HNW.

"Jadi menurut saya, segala upaya untuk menyelesaikan kita apresiasi, tapi jangan kemudian hanya di satu sisi saja, kaitan dengan baju, misalnya," tambahnya.

HNW menegaskan yang terpenting dari MBG adalah kualitas makanan yang dihadirkan. Ia menyebut sopir mengenakan pakaian Power Rangers pun belum tentu dilihat oleh siswa.

"Apalagi baju kan anak-anak nggak ngelihat. Dia menyopir, kemudian masukkan mobilnya, setelah itu barang-barang diambil, anak-anak mungkin masih di kelas. Jadi yang dipentingkan justru adalah kualitas dari makanan itu, yang betul-betul melibatkan ahli gizi, betul-betul disukai oleh anak-anak dan kemudian karenanya menyuksekkan program MBG," ungkapnya.

HNW menyebut BGN jangan hanya mementingkan tampilan luar terkait program itu. Ia menekankan harus ada



(Ilustrasi) Dominasi kampus berorientasi teaching university perlu diimbangi dengan penguatan research university di Indonesia.(dok)

evaluasi secara menyeluruh.

"Jangan hanya tampilan luar dan apalagi hanya baju sopir. Justru sopir itu, seperti Kepala MBG, beliau akan melakukan evaluasi terhadap sopir, terhadap mobil, itu benar. Mobil harus dievaluasi, jangan sampai remnya blong, kemudian malah menabrak murid," ucap legislator PKS ini.

HNW mengingatkan tragedi di SDN

Kalibaru 01 Jakut jangan sampai terulang kembali. Ia kemudian menyindir lebih baik mengenakan pakaian Gatotkaca dibanding hanya Power Rangers.

"Sopirnya harus dievaluasi, jangan sampai malah sopir gantian atau sopir pengganti yang justru malah menghadirkan tragedi, itu evaluasi menyeluruh tetap ya. Tapi sekali lagi,

SPPG Daerah Terpencil Minim, Ditarget 8.200 Dapur di 2026

BADAN Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) pada 2026. Kepala BGN Dadan Hidayana mengatakan, sampai pengujung tahun ini, jumlah SPPG di daerah 3T baru mencapai sekitar 190 unit.

"Kami rencanakan 8.200, tetapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190-an," katanya usai rapat koordinasi penyelenggaraan program MBG di Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/12/2025).

Meski demikian, Dadan optimistis pembangunan SPPG di wilayah 3T dapat dipercepat. Salah satu pendukungnya adalah proses seleksi sumber daya manusia BGN yang kini tengah berjalan. Menurut dia, BGN telah memproses Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT) sebagai salah satu tahapan

seleksi PPPK dan CPNS BGN. Secara nasional, BGN menargetkan percepatan pendirian SPPG hingga akhir tahun mencapai 19.000 unit di seluruh Indonesia.

"Tahun depan kami ingin ada minimal 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 8.200 di daerah terpencil sehingga total ada 32 sampai 33 ribu SPPG yang melayani 82,9 juta (siswa)," kata Dadan.

Selain pembangunan dapur MBG, BGN juga mendorong percepatan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG, termasuk di Jawa Barat. Saat ini, dari 1.548 SPPG di Jawa Barat yang mengajukan SLHS, sekitar 900 dapur telah resmi mengantongi sertifikat tersebut.

"Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur agar ada percepatan lagi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rakor

jangan hanya disederhanakan dengan baju apalagi Power Rangers, mungkin Gatotkaca lebih bagus," tuturnya.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Dia mempertanyakan apakah langkah itu ada kaitannya dengan minat siswa untuk mengonsumsi MBG.

"Memang ada kaitan? Mungkin memang anak-anak surprise melihat ada power rangers, tapi itu tidak akan membuat mereka serta merta mau makan, jika menunya tidak membuat mereka berselera," ujar Irma kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Anggota DPR dari Fraksi NasDem ini mengatakan perlu ada edukasi hingga gaya hidup yang mesti dipraktikkan siswa dalam menyantap makanan, terutama sayur-mayur. Dia menyebut semestinya BGN mencari solusi menu yang menarik untuk disajikan ke siswa.(gus,ant,ist/dya)

STATUS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Capaian Nasional

(Data per 18 Nov 2025)

Total Penerima: 41,9 juta orang | Total SPPG (Dapur) 15.369 unit.

Sebaran Realisasi

Berdasarkan Wilayah

SUMATERA
Total Penerima: 8,6 juta orang | Total SPPG (Dapur) 3.142 unit.

JAWA
Total Penerima: 25,68 juta orang | Total SPPG (Dapur) 9.107 unit.

KALIMANTAN
Total Penerima: 1,7 juta orang | Total SPPG (Dapur) 703 unit.

BALI & NUSA TENGGARA
Total Penerima: 2,15 juta orang | Total SPPG (Dapur) 735 unit.

SULAWESI
Total Penerima: 2,74 juta orang | Total SPPG (Dapur) 1.069 unit.

MALUKU & PAPUA
Total Penerima: 0,69 juta orang | Total SPPG (Dapur) 265 unit.



Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Bandung, Rabu, menegaskan peran daerah sebagai kunci suksesnya program nasional MBG.

Rakor ini menjadi ruang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).(ant,ist/dya)

DANA NON-BUJETER BJB RP 200 M, TERENDUS MENGALIR KE RIDWAN KAMIL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, terendus sebagian dana non-bujeter yang dialokasikan dari Bank BJB diduga mengalir ke eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK). Dana tersebut diduga diperoleh dari dugaan korupsi pengadaan iklan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank BJB).

"Dana non-bujeter ini bersumber dari sebagian anggaran yang semestinya digunakan untuk belanja iklan di BJB, tapi sebagiannya sekitar 50 persen, ya ada Rp 200-an miliar begitu, itu masuk ke dana non-bujeter yang dikelola di Corsec BJB," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

"Di mana dana non-bujeter ini mengalir ke sejumlah pihak. Di antaranya yang ditelusuri dan diduga adalah mengalir ke Saudara RK," lanjut Budi.

Budi menjelaskan, hal tersebut yang menjadi alasan pihaknya menyita sejumlah aset milik RK. Sejauh ini, KPK sudah menyita motor Royal Enfield milik RK.

Selain itu, ada juga sejumlah uang yang dipergunakan untuk membayar pembelian mobil Mercedes Benz yang



Sebuah layar menunjukkan nama Anggota DPR RI Atalia Praratya dan suaminya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terdaftar dalam agenda sidang perceraian di Pengadilan Agama, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025). (ANTARA)

dibeli RK dari anak Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Ilham Habibie.

"Sehingga KPK kemudian melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, baik yang atas nama Saudara RK ataupun aset-aset lainnya yang diduga terkait," ujarnya.

RK telah dimintai keterangan oleh KPK pada Selasa (2/12/2025) lalu. Pemeriksaan terhadap RK berlangsung selama sekitar 6 jam.

Usai menjalani pemeriksaan, RK mengaku sangat senang bisa memberikan klarifikasi atas segala tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.

"Ya jadi pertama saya sangat bahagia karena ini momen yang ditunggu-tunggu, berbulan-bulan ingin melakukan klarifikasi kan ya. Nah hari ini saya sudah melakukan klarifikasi," ujar RK.

RK juga mengaku tak tahu-menahu terkait perkara korupsi yang tengah diusut KPK pada bank pelat merah itu.

"Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini," ucapnya.

Terkait asetnya yang disita KPK, RK mengaku membelinya menggunakan uang pribadi. Sementara soal aliran dana ke selebgram Lisa Mariana, RK mengaku diperas.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Para tersangka tersebut ialah mantan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi; Pimpinan Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto; Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Kin Asikin Dulmanan; Pengendali Agensi BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE) Suhendrik; dan Pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) Raden Sophan Jaya Kusuma.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Kasus ini terkait dengan dugaan korupsi penempatan iklan BJB di media pada 2021-2023. Diduga ada kongkalikong dari pihak BJB dengan agensi iklan untuk mengakali pengadaan iklan tersebut.

Dari sekitar Rp 300 miliar yang dianggarkan, diduga hanya Rp 100 miliar yang benar-benar dipakai untuk iklan di media. (wid,rls,kum/dya)

Pengamat: Dapat Diputuskan Gubernur

PEMERINTAH pusat hingga kini belum menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan yang akan dijadikan dasar penetapan UMP tahun 2026. Untuk itu, pengamat menilai pemerintah provinsi (gubernur) bisa mengambil alih untuk memutuskan penetapan UMP.

Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan hal ini dibenarkan melalui peraturan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU No 6 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa upah minimum Provinsi dan Kabupaten dapat diputuskan oleh Gubernur.

"Undang-Undang 13 maupun di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 6 yang tahun 2023, Junto PP36 tahun 2021, itu kan yang menetapkan upah minimum Provinsi dan Kabupaten adalah Gubernur," kata dia, Selasa (16/12/2025).

Selanjutnya, Gubernur, dapat memberikan arahan kepada Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang berfungsi sebagai lembaga non-struktural yang memiliki fungsi utama untuk memberikan saran,

pertimbangan, dan rekomendasi kepada gubernur atau bupati/wali kota dalam penetapan kebijakan pengupahan di daerah.

"Nah, tinggal nanti Gubernur memberikan arahan kepada Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang memang diamanatkan dalam putusan MK No 168," tambahnya.

Dia juga mengkritisi langkah dari Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang selalu menunggu keputusan Presiden Prabowo terkait UMP, ini berkaca pada keputusan UMP 2025 lalu.

"Waktu kemarin kan sebenarnya dikasih 6% (dari Menaker), Tapi Presiden minta 6,5%. Nah dia tidak mau kejadian seperti itu lagi, sehingga dia hati-hati, menyerahkan terus ke Presiden," jelas Timboel.

Menurutnya, sebagai menteri, apalagi dengan deadline yang semakin dekat, Yassierli harusnya dapat menyelesaikan sendiri tugas dari kementerian yang dipimpinnya.

"Jadi sekarang pun nunggu Presiden, Menteri Tenaga Kerja masih meminta presiden yang ngomong gitu loh, Supaya aman gitu. Artinya dia

tidak mau ditekan pengusaha, tidak ditekan pekerja, karena presiden yang ngomong," tambahnya.

Padahal menurutnya, UMP berkaitan erat dengan penentuan standar gaji pokok minimum yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh di suatu wilayah provinsi tahun depan.

"Labor cost, berkaitan dengan harga pokok penjualan dan akan berkaitan dengan berapa harga produknya. Karena kan memang betul, harga produk itu kan ditentukan oleh cost-cost yang muncul, termasuk labor cost," jelasnya.

Terpisah, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengaku belum mendapatkan informasi terkait alasan penundaan pengumuman tersebut. Demikian pula dengan dinamika terakhir mengenai penandatanganan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. Kendati demikian, dia berharap keputusan mengenai kenaikan UMP 2026 dapat diambil pemerintah secara tepat. (tin,bis,ktn/dya)

DERETAN MASALAH DIHADAPI RIDWAN KAMIL (RK)

1. Dugaan Korupsi Iklan Bank BJB

- RK diperiksa KPK sebagai saksi pengadaan iklan
- Dugaan kerugian negara Rp22 miliar akibat mark-up
- KPK telusuri dana non-budgeter Rp200 miliar
- Status hukum RK masih saksi dan kooperatif

2. Perseteruan dengan Lisa Mariana

- Lisa ditetapkan tersangka pencemaran nama baik
- Gugatan perdata Lisa ditolak, RK ajukan gugatan balik
- Tes DNA Polri memastikan RK bukan ayah biologis

3. Gugatan Cerai Atalia Praratya

- Atalia resmi menggugat cerai RK
- Sidang perdana digelar 17 Desember 2025
- Tidak ada tuntutan harta gana-gini



Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa proses pembelian aset tersebut hampir rampung. Saat ini pemerintah masih menunggu pengesahan kepemilikan dari otoritas Arab Saudi yang dijadwalkan pada Januari 2026.

“Langkah awal untuk membangun Kampung Haji Indonesia di Mekkah terus berjalan. Danantara telah membeli secara bersyarat sebuah hotel yang berada di kawasan Thahir, sekitar Masjidil Haram,” ujar Rosan sesuai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Hotel yang dibeli tersebut terdiri dari tiga menara dengan total 1.460 kamar. Rosan menjelaskan, hotel itu berdiri di atas lahan seluas sekitar setengah hektare dan dibangun pada 2022. Pemerintah juga membeli lahan tambahan di depan hotel dengan luas total sekitar 5 hektare.

“Kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektar,” kata Rosan.

Menurutnya, pembelian ini masih berstatus bersyarat karena regulasi Arab Saudi baru memungkinkan kepemilikan properti oleh negara lain disahkan mulai Januari 2026. Jika seluruh proses administrasi selesai, Indonesia akan menjadi negara pertama di luar Arab Saudi yang memiliki lahan di Kota Mekkah.

“Nah, dari 1.460 kamar yang kita sudah beli dan sudah jadi itu, terdiri dari tiga tower, dan itu bisa membawa kapasitas 4.383 jamaah haji Indonesia,” ujar Rosan.

Di atas lahan tersebut, pemerintah berencana membangun kawasan terpadu berupa 13 menara hotel dan satu pusat perbelanjaan. Total nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai 700—800 juta dollar AS, di luar nilai pembelian hotel yang mencapai lebih dari 500 juta dollar AS.

“Untuk rencana kita membangun 13 tower dan mal, ini masih tentatif, angkanya kurang lebih US\$700 sampai US\$800 juta,” kata Rosan.

Nantinya, 13 menara tersebut akan memiliki sekitar 6.025 kamar yang dapat menampung sedikitnya 23.000 jamaah haji Indonesia. Pembangunan fisik direncanakan dimulai pada kuartal IV-2026.

“Kita akan menggambar dan akan mulai pembangunannya rencana pada Q-4 2026,” ujarnya.

Selain akomodasi dan fasilitas komersial, pemerintah juga menyiapkan akses langsung menuju Masjidil Haram melalui terowongan Al-Hujun. Terowongan ini berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram, lebih dekat dibandingkan terowongan lain yang saat ini jaraknya mencapai 4,5 hingga 6 kilometer.

BELI HOTEL DAN LAHAN DI MEKKAH, 2026 PEMBANGUNAN KAMPUNG HAJI DIMULAI

Pemerintah Indonesia mulai merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, melalui pembelian bersyarat hotel dan lahan strategis di sekitar Masjidil Haram. Proyek besar ini ditargetkan mulai dibangun pada triwulan IV-2026 dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan ibadah haji sekaligus menekan biaya yang selama ini ditanggung jamaah



Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, meninjau langsung lokasi yang diproyeksikan sebagai Kampung Haji Indonesia di kawasan Jabal Hindawiyah, Makkah, pada Senin, 20 Oktober 2025. (ist)

“Dan jembatan itu 2026 akan selesai. Nama jembatannya Al-Hujun Tunnel,” tutur Rosan.

Tak berhenti di kawasan Thahir;

Danantara juga mengikuti proses lelang lahan lain di kawasan Western Hindawiyah yang jaraknya juga sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Dari

sekitar 90 peserta lelang, Indonesia saat ini berada di peringkat dua besar.

“Alhamdulillah, dari 90 bidder ini kita sudah masuk dua besar,” kata Rosan

Ia menjelaskan, proses lelang tidak ditentukan oleh besaran harga karena harga tanah sudah ditetapkan. Penilaian lebih difokuskan pada desain, rencana pembangunan, serta kepatuhan terhadap regulasi setempat. Pengumuman pemenang lelang dijadwalkan pada akhir Desember 2025 atau Januari 2026.

“Kalau kita mendapatkan lahan itu, insya Allah seluruh jamaah haji kita bisa terlayani, mempunyai tempat yang sangat baik, yang sangat layak, sangat dekat dibandingkan keadaan sekarang,” ujar Rosan. (wid,kcm,blo/dya)

Aturan Transportasi Diperketat



PEMERINTAH Kerajaan Arab Saudi kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam meningkatkan standar pelayanan bagi tamu Allah pada musim haji mendatang.

Melalui Royal Commission for Makkah and the Holy Sites, otoritas setempat resmi memberlakukan Aturan Transportasi Haji 2026 yang jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan strategis ini diambil demi menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan jutaan jamaah dari seluruh dunia, termasuk jamaah asal Indonesia.

Pada Rabu (17/12/2025) berbagai sumber mengonfirmasi

bahwa regulasi baru ini memuat ancaman sanksi tegas bagi operator transportasi yang lalai.

Setiap bentuk pelanggaran standar layanan kini dinilai memiliki konsekuensi langsung terhadap kelangsungan izin operasional perusahaan penyedia jasa tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari visi besar Arab Saudi untuk menertibkan manajemen logistik di Tanah Suci yang kerap menjadi tantangan utama setiap tahunnya.

Otoritas menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang toleransi bagi penyedia layanan yang bekerja secara amatir atau tanpa izin resmi.

Sanksi Finansial dan Izin Dicabut

Dalam regulasi terbaru ini, besaran denda yang diterapkan bagi pelanggar tergolong sangat signifikan untuk memberikan efek jera.

Operator yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan denda mulai dari 150 Riyal Saudi atau sekitar Rp665 ribu untuk pelanggaran ringan.

Sementara untuk pelanggaran berat, denda maksimal bisa mencapai 100.000 Riyal Saudi atau setara dengan Rp443 juta.

Namun, risiko yang dihadapi perusahaan transportasi tidak berhenti pada sanksi finansial semata.

Perusahaan yang dinilai tidak kompeten berisiko dilarang terlibat dalam operasional haji selama satu hingga tiga musim berturut-turut.

Bahkan, untuk kategori pelanggaran yang sangat fatal dan membahayakan jamaah, otoritas berwenang memiliki hak penuh untuk menjatuhkan sanksi pencabutan izin operasional secara permanen.

Ketegasan ini diharapkan dapat menyaring operator-operator nakal yang selama ini hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan standar keselamatan.

Selain soal sanksi, aturan ini juga memperkuat mekanisme pendaftaran dan verifikasi armada angkutan haji. Setiap perusahaan transportasi diwajibkan mendaftarkan diri kembali setiap tahunnya dengan melampirkan data komprehensif.

Data tersebut meliputi jumlah armada bus yang tersedia, bukti kesiapan teknis kendaraan, serta pemenuhan persyaratan administratif lainnya. (wid,ist/dya)

Jelang Nataru, Wisata di Kabupaten Malang Diminta Siapkan Asuransi dan Kendalikan Kapasitas

MALANG - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang mengimbau seluruh destinasi wisata untuk menyediakan perlindungan asuransi bagi wisatawan maupun karyawan. Selain itu, pengelola juga diminta mengendalikan kapasitas pengunjung selama libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) Disparbud Kabupaten Malang. Sebagai langkah antisipatif guna menjaga keamanan, ketertiban, serta keselamatan aktivitas pariwisata selama periode libur Nataru di wilayah setempat.

"Pada momen libur Nataru tahun ini kami tidak menetapkan target jumlah kunjungan. Prioritas kami adalah keamanan, ketertiban, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di destinasi wisata," ujar Kepala Disparbud Kabupaten Malang, Firmando Hashiholan Matondang, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (17/12/2025).

Firmando menjelaskan, kesiapsiagaan tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi pengamanan libur Nataru yang dipimpin langsung

oleh Kapolres Malang.

Rapat ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terkait dan membahas pengamanan destinasi wisata serta mitigasi bencana, terutama di lokasi wisata yang dinilai rawan.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Mando itu menyampaikan, dalam surat edaran tersebut, pengelola destinasi wisata diwajibkan memastikan penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh area wisata.

"Pengelola juga diwajibkan melakukan uji kelayakan serta perawatan fasilitas dan wahana secara berkala, terutama pada wahana yang memiliki tingkat risiko tinggi. Termasuk menyediakan pilihan perlindungan asuransi bagi wisatawan maupun pegawai," jelasnya.

Selain aspek keselamatan, pihaknya juga menekankan pentingnya mitigasi bencana alam maupun non-alam di lingkungan usaha pariwisata. Pengelola diminta aktif berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan

wisatawan serta tenaga kerja.

"Poin penting lainnya adalah kewajiban pengelola untuk memperhitungkan daya dukung dan daya tampung destinasi wisata. Hal ini penting untuk menjaga kenyamanan pengunjung sekaligus mencegah terjadinya kelebihan kapasitas," ungkap Mando.

Sementara itu, Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo PS sebelumnya menegaskan, berdasarkan pemetaan Polres Malang, terdapat sejumlah titik krusial di Kabupaten Malang yang berpotensi mengalami peningkatan aktivitas selama libur panjang Nataru.

"Mulai dari enam stasiun kereta api, 13 terminal, 347 lokasi ibadah umat Nasrani, hingga 183 destinasi wisata. Seluruhnya menjadi fokus



Ilustrasi: Pantai Kondang Merak, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang menjadi salah satu jalur off road jeep wisata. (dok. Prokopim Kab Malang)

pengamanan kami selama libur Nataru," kata Danang.

Ia juga menyoroti kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di akhir tahun, khususnya di wilayah pesisir pantai Kabupaten Malang. Menurutnya, destinasi wisata pantai menjadi salah satu titik perhatian utama aparat kepolisian. (Santi/Dya)

Di Ujung Tahun, Kota Malang Masih Harus Kejar Investasi Rp900 M untuk Penuhi Target



Kepala Disnaker Kota Malang, Arif Tri Sastyawan. (Santi/Lentera)

MALANG - Realisasi investasi di Kota Malang hingga November 2025 tercatat mencapai Rp2,3 triliun dari target sebesar Rp3,2 triliun. Dengan capaian tersebut, masih terdapat pekerjaan rumah (PR) investasi senilai sekitar Rp900 miliar yang belum terealisasi menjelang tutup tahun 2025.

"Penghitungan realisasi investasi itu per triwulan dan semester. Jadi untuk bulan Desember ini nanti datanya baru akan keluar pada Januari 2026," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, Rabu (17/12/2025).

Ditambahkannya, pengumuman resmi realisasi investasi daerah biasanya disampaikan melalui kanal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia. Data tersebut umumnya dirilis pada awal tahun berikutnya. "Biasanya diumumkan sekitar tanggal 15 atau 20 Januari," katanya.

Meski belum final, Arif menyebut hingga November 2025 realisasi investasi Kota Malang telah menyentuh angka Rp2,3 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah target

investasi Kota Malang tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3,2 triliun. "Artinya masih ada sekitar Rp900 miliar yang belum terealisasi," jelas Arif.

Kendati demikian, pihaknya optimistis realisasi investasi pada Desember 2025 akan mampu menutup kekurangan dari target yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, sepanjang tahun 2025, dikatakannya sektor perhotelan menjadi salah satu penyumbang utama investasi di Kota Malang, selain industri rokok. Arif mencatat terdapat tiga proyek hotel yang seluruh proses perizinannya telah rampung pada tahun ini.

"Tahun ini ada tiga perizinan hotel yang selesai. Di Jalan Letjen Sutoyo ada Novotel, di Jalan Soekarno-Hatta ada Java Dwipa Hotel, dan di Jalan MT Haryono ada apartel atau apartemen hotel yang kemarin sudah dilakukan peletakan batu pertama," paparnya.

Menurut Arif, ketiga proyek tersebut telah mengantongi perizinan utama sebagai syarat pembangunan. Mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis

Dampak Lalu Lintas (Andalalin), hingga Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). "Perizinan Bangunan Gedung atau PBG juga sudah selesai," katanya.

Ia menjelaskan, setelah pembangunan fisik rampung, pengelola baru dapat mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Selanjutnya, perizinan operasional seperti izin hotel, restoran, serta usaha penunjang lainnya akan diterbitkan.

"Estimasi pembangunan sekitar dua tahunan dan rencananya mulai berjalan pada Januari 2026," tambah Arif.

Selain sektor perhotelan, industri rokok sigaret kretek tangan (SKT) masih menjadi tulang punggung investasi di Kota Malang. Saat ini tercatat sekitar 52 pabrik rokok yang beroperasi, termasuk tambahan 10 pabrik rokok SKT baru.

"Mayoritas pabrik rokok baru itu berada di wilayah Kedungkandang. Jumlah tenaga kerjanya rata-rata antara 100 hingga 500 orang per pabrik," pungkas Arif. (Santi/Dya)

WARGA 39 NEGARA DILARANG MASUK AS, TERMASUK PALESTINA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mempertegas kebijakan imigrasi keras dengan menandatangani deklarasi baru yang memperluas larangan dan pembatasan perjalanan ke Amerika Serikat. Kebijakan ini mencakup 39 negara serta pemegang dokumen perjalanan Otoritas Palestina. Aturan dijadwalkan mulai berlaku 1 Januari 2026.

Keputusan tersebut diteken Trump pada Selasa (16/12/2025) waktu setempat dan diumumkan Gedung Putih sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat keamanan nasional, penegakan hukum imigrasi, serta perlindungan terhadap kepentingan Amerika Serikat.

Dalam deklarasi itu, pemerintah AS membagi kebijakan ke dalam dua kategori utama, yakni larangan perjalanan penuh dan pembatasan perjalanan parsial.

Sejumlah negara kini dikenai larangan total, yang berarti warganya tidak dapat memasuki AS baik untuk keperluan wisata, pendidikan, bisnis, pekerjaan, maupun migrasi.

Negara-negara yang masuk dalam kategori ini antara lain Suriah, Burkina Faso, Mali, Niger, Sudan Selatan, Laos dan Sierra Leone.

Selain itu, larangan penuh juga kembali ditegaskan terhadap negara-negara yang sebelumnya sudah masuk daftar sejak Juni 2025, yakni Afghanistan, Myanmar, Chad, Republik Kongo, Guinea Ekuatorial, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Dengan demikian, total terdapat 19 negara yang berada di bawah larangan perjalanan penuh.

Pemerintah AS juga secara khusus memberlakukan larangan menyeluruh terhadap pemegang dokumen perjalanan yang diterbitkan Otoritas Palestina. Meski Palestina tidak diakui sebagai negara oleh AS, kebijakan ini berlaku terhadap seluruh bentuk dokumen perjalanan yang dikeluarkan



WASHINGTON DIKEPUNG BANJIR

Banjir meredam kawasan perumahan akibat Sungai Green yang meluap akibat tanggul yang jebol di Pacific, Washington, Amerika Serikat, Selasa (16/12/2025) waktu setempat. Dikutip dari Reuters, Layanan Cuaca Nasional (NWS) mengatakan telah mengeluarkan peringatan banjir bandang setelah kegagalan di Tanggul Desimone di Tukwila sepanjang Sungai Green, sekitar lima mil selatan pusat kota Seattle. Imbasnya sebanyak 46 ribu orang harus dievakuasi akibat peristiwa ini. Selain itu, terlihat juga puluhan kendaraan yang terendam oleh banjir. (ist.Reuters)

otoritas setempat.

Langkah tersebut memperluas pembatasan sebelumnya yang telah membuat pemegang paspor Otoritas Palestina hampir mustahil memasuki AS untuk kepentingan bisnis, pendidikan, maupun wisata. Dalam kebijakan terbaru, larangan bahkan mencakup migrasi permanen.

Selain larangan penuh, AS juga memberlakukan pembatasan sebagian terhadap 19 negara lainnya,

mayoritas berasal dari Afrika sub-Sahara serta kawasan Karibia dan Pasifik.

Pemerintah AS juga mencabut penangguhan pembatasan parsial terhadap Turkmenistan, sehingga total negara dalam kategori pembatasan parsial kini mencapai 19.

Pembatasan ini berlaku bagi wisatawan, pelajar, pelaku perjalanan bisnis, hingga individu yang berniat bermigrasi. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi

semua orang.

Pengecualian Kebijakan

Gedung Putih menegaskan bahwa sejumlah kelompok tetap dikecualikan dari larangan dan pembatasan ini, antara lain pemegang visa yang masih berlaku. Selain itu juga penduduk tetap sah (green card holder).

Aturan ini juga tak berlaku untuk pemegang visa khusus seperti diplomat dan atlet serta individu yang masuk ke AS atas dasar kepentingan nasional AS.

Meski Trump sejak awal masa kepresidenannya menjadikan pengetatan imigrasi sebagai agenda utama, perluasan larangan ini disebut dipicu oleh serangkaian peristiwa keamanan terbaru.

Pemerintah AS mengaitkan kebijakan ini dengan penangkapan seorang warga negara Afghanistan yang diduga menembak dua anggota Garda Nasional AS pada November 2025. Insiden tersebut mendorong penghentian sementara proses suaka dan imigrasi dari negara-negara yang kini masuk daftar pembatasan.

Selain itu, Trump juga mengaitkan kebijakan ini dengan serangan yang diduga dilakukan kelompok ISIS di Suriah pada 13 Desember 2025, yang menewaskan dua tentara AS dan seorang penerjemah. Trump bahkan bersumpah akan melakukan "pembalasan yang sangat serius" atas serangan tersebut.

Gedung Putih menyatakan bahwa banyak negara yang terkena pembatasan memiliki tingkat korupsi tinggi, dokumen sipil yang tidak dapat diverifikasi, serta catatan kriminal yang menyulitkan proses pemeriksaan keamanan. Beberapa negara juga dinilai memiliki tingkat pelanggaran izin tinggal yang tinggi atau menolak menerima kembali warganya yang dideportasi.

Dalam konteks Palestina, AS beralasan bahwa konflik bersenjata yang terus berlangsung di Tepi Barat dan Jalur Gaza telah mengganggu kemampuan penyaringan keamanan. Pemerintah AS juga menuding adanya aktivitas kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris di wilayah tersebut.

Kebijakan ini menuai kritik keras dari organisasi hak asasi manusia dan kelompok pendukung pengungsi. Mereka menilai larangan perjalanan diperluas ini bersifat diskriminatif dan menggunakan alasan keamanan nasional untuk membatasi warga berdasarkan asal negara. (wid,rtr;ist/dya)

Trump Sebut Rezim Presiden Maduro Teroris

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan "blokade total" terhadap semua kapal tanker minyak, yang dikenai sanksi, yang memasuki atau meninggalkan perairan Venezuela. Trump juga menyebut pemerintahan Presiden Nicolas Maduro sebagai "organisasi teroris asing".

"Venezuela sepenuhnya dikelilingi oleh armada terbesar yang pernah dikerahkan dalam sejarah Amerika Selatan," tulis Trump dalam pernyataan via Social Truth, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (17/12/2025).

Trump mengatakan bahwa blokade akan tetap diberlakukan hingga Caracas mengembalikan "semua minyak, wilayah, dan aset-

aset lainnya, yang sebelumnya mereka curi dari kita" -- diduga merujuk pada nasionalisasi aset-aset AS pada dekade sebelumnya.

Dia menuduh rezim Maduro menggunakan pendapatan minyak Venezuela untuk mendanai "terorisme narkoba, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan". Trump juga mengatakan bahwa warga-warga Venezuela yang sebelumnya dikirimkan ke AS sedang dipulangkan "dengan cepat".

Pengumuman ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara, dengan Trump terus menuntut Maduro mundur dari kekuasaan dan menyatakan bahwa semua opsi, termasuk kekuatan militer, tetap terbuka di tengah

peningkatan pengerahan militer besar-besaran di kawasan tersebut.

AS telah melancarkan sedikitnya 22 serangan yang diketahui terhadap kapal-kapal yang diduga menyelundupkan narkoba. Sedikitnya 87 orang tewas dalam rentetan serangan Washington sejak operasi yang diklaim bertujuan memerangi narkoba itu dimulai di Laut Karibia dan Pasifik Timur pada awal September lalu.

Caracas baru-baru ini menuduh AS melakukan "pembajakan maritim" dan mengecam "kebijakan paksaan dan agresi yang berkelanjutan" setelah Washington menyita pengiriman minyak Venezuela di perairan internasional. (ist,gus/dya)

WASPADAI NATRIUM TERSEMBUNYI DALAM MAKANAN SEHARI-HARI

Mengendalikan asupan garam harian merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan, mengingat natrium kerap tersembunyi dalam berbagai makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sayangnya, masih banyak yang tidak sadar atau paham berbagai makanan harian yang ternyata memiliki kandungan garam tinggi.

Banyak orang tidak menyadari bahwa kelebihan natrium dapat meningkatkan risiko hipertensi, gangguan jantung, hingga penyakit ginjal kronis. Kelompok yang paling rentan terdampak adalah ibu hamil, karena konsumsi natrium berlebih dapat memicu pembengkakan hingga komplikasi serius seperti preeklamsia.

Dokter Spesialis Gizi Klinis, dr. Verawati Sudarma, M.Gizi, SpGK, menjelaskan bahwa kandungan garam pada label pangan sering ditulis dengan istilah berbeda. Pada produk berbahasa Indonesia, garam umumnya dicantumkan sebagai natrium, sedangkan pada produk berbahasa Inggris menggunakan istilah sodium. Ada pula produk yang menuliskan salt, namun yang paling penting untuk diperhatikan tetaplah jumlah natrium yang tercantum dalam

informasi nilai gizi.

Menurut dr. Verawati, batas aman konsumsi natrium harian adalah 2.300 miligram per hari. Oleh karena itu, kebiasaan membaca label gizi menjadi sangat krusial sebelum membeli atau mengonsumsi produk kemasan.

Ia menyarankan konsumen memperhatikan persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) natrium per sajian. Jika persentasenya berada di bawah 5 persen, produk tersebut tergolong rendah natrium. Namun, bila sudah mencapai atau melebihi 20 persen, maka kandungan natriumnya tergolong tinggi dan sebaiknya dibatasi.

Natrium tinggi paling sering ditemukan pada makanan yang tampak biasa dikonsumsi sehari-hari. Saus, sambal, dan berbagai jenis condiment menjadi salah satu penyumbang terbesar asupan natrium karena hampir selalu mengandung garam dalam jumlah tinggi. Demikian pula dengan camilan asin yang umumnya telah melalui proses pengolahan dengan penambahan natrium.

Selain itu, makanan olahan yang dipanggang—terutama yang menggunakan mentega atau butter—cenderung memiliki kadar natrium tinggi. Produk kemasan dengan cita rasa gurih juga perlu diwaspadai.

Banyak orang menganggap kaldu sebagai bahan yang alami dan sehat, padahal berbagai jenis bubuk kaldu, bumbu instan, dan penyedap rasa mengandung natrium tinggi yang dapat menumpuk tanpa disadari dalam konsumsi harian. "Berbagai macam kaldu kesannya sehat, tapi sebenarnya sama saja," ujar dr. Verawati.

Pembahasan mengenai natrium tidak bisa dilepaskan dari risiko hipertensi, terutama pada ibu hamil. dr. Verawati menegaskan bahwa larangan konsumsi mi instan bagi ibu hamil sering kali disalahpahami. Bukan mi instannya yang menjadi masalah utama, melainkan kandungan natriumnya yang sangat tinggi. Asupan natrium berlebih dapat menyebabkan pembengkakan lebih cepat dan

meningkatkan risiko preeklamsia.

Tingkatkan Risiko Ginjal Kronis

Dari sisi kesehatan ginjal, natrium sebenarnya merupakan mineral penting yang dibutuhkan tubuh agar dapat berfungsi dengan baik. Natrium yang dikombinasikan dengan klorida membentuk garam dapur, dan secara alami dibutuhkan dalam jumlah kecil. Namun, natrium sering ditambahkan dalam jumlah besar pada makanan olahan, makanan kemasan, serta makanan beku.

Menurut dr. Ivan Porter II, ahli nefrologi dari Mayo Clinic, konsumsi garam berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis. Ginjal berfungsi menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Jika natrium dikonsumsi secara berlebihan, zat ini dapat menumpuk dalam darah, memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan pada akhirnya meningkatkan tekanan darah. Kondisi ini berisiko memicu penyakit jantung, stroke, serta kerusakan ginjal.

dr. Porter menjelaskan bahwa penyakit ginjal kronis terjadi ketika ginjal mengalami gangguan dalam menyaring limbah dan racun dari darah. Natrium yang berlebihan sangat mudah dikonsumsi tanpa disadari karena banyak tersembunyi dalam makanan olahan dan bumbu. Akibatnya, seseorang dapat dengan cepat melampaui kebutuhan natrium harian hingga mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan secara keseluruhan.

The American Heart Association (AHA) juga merekomendasikan batas konsumsi natrium maksimal 2.300 miligram per hari, setara dengan sekitar satu sendok teh garam. Untuk mengurangi risiko, dr. Porter menyarankan masyarakat lebih teliti membaca label makanan dan mulai mengganti penggunaan garam dengan bumbu bebas garam atau rempah alami.

Ia menambahkan bahwa pada tahap awal, sebagian kerusakan ginjal akibat konsumsi natrium berlebih masih dapat dihentikan atau bahkan dibalikkan.

Namun, semakin lama kondisi tersebut berlangsung, tingkat kerusakan akan semakin parah dan peluang untuk kembali ke fungsi ginjal yang sehat menjadi semakin kecil. Pada tahap lanjut, penderita bahkan harus mempertimbangkan terapi pengganti ginjal seperti dialisis atau transplantasi.

Dengan memahami sumber natrium tersembunyi dan membatasi asupan garam harian, risiko hipertensi, gangguan jantung, serta penyakit ginjal kronis dapat ditekan sejak dini, baik pada ibu hamil maupun masyarakat umum. (wud,ist/dya)

Rekomendasi Asupan Garam

Dewasa:

Maksimal 5 gram per hari (sekitar 1 sendok teh), atau 2000 mg natrium.

Anak-anak:

Disesuaikan dengan usia, umumnya lebih rendah dari 5 gram.

1-3 tahun:

Sekitar 2 gram per hari.

4-6 tahun:

Sekitar 2,5 - 3 gram per hari.

7-10 tahun:

Sekitar 3-5 gram per hari.

Mengapa Penting Membatasi?

Pencegahan Penyakit:

Konsumsi garam berlebih meningkatkan risiko tekanan darah tinggi (hipertensi), penyakit jantung, dan stroke.

Keseimbangan Cairan:

Natrium dalam garam membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh, fungsi saraf, dan otot, namun dalam batas wajar.



TEMUAN ILMU BIOLOGI DAN TEKNOLOGI KUNO DI BALIK KUATNYA TEMBOK BESAR CHINA

Tembok Besar China selama berabad-abad dipandang sebagai simbol kekuatan militer dan kecanggihan teknik sipil peradaban kuno. Bahkan, riset ilmiah mutakhir menunjukkan bahwa ketahanannya tidak hanya bergantung pada batu, tanah, dan strategi pertahanan, melainkan juga pada mekanisme biologis alami yang selama ini luput dari perhatian.



Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah *Current Biology* mengungkap bahwa permukaan Tembok Besar China dilapisi oleh biological soil crust atau biokrust, sebuah komunitas mikroorganisme yang berfungsi sebagai lapisan pelindung alami terhadap degradasi struktural.

Temuan ini dipadukan dengan hasil ekskavasi arkeologi terbaru yang mengungkap teknologi material canggih era Dinasti Ming, memperlihatkan bahwa ketahanan Tembok Besar merupakan hasil interaksi kompleks antara biologi, material, dan lingkungan.

Biokrust adalah lapisan tipis yang terbentuk secara alami di permukaan tanah atau bangunan berbahan mineral, terutama di wilayah kering dan semi-kering. Lapisan ini tersusun atas cyanobacteria, alga, lumut kerak

(lichen), lumut (moss), bakteri, dan jamur yang saling berinteraksi membentuk struktur mikro yang stabil.

Dalam konteks Tembok Besar China, biokrust bekerja layaknya 'kulit hidup' yang menyelimuti permukaan dinding tanah dan batu. Cyanobacteria menghasilkan zat lengket bernama extracellular polymeric substances (EPS), yang berfungsi merekatkan partikel tanah dan mineral. Proses ini secara signifikan mengurangi erosi akibat angin, hujan, dan fluktuasi suhu.

Selain itu, lumut dan lichen membantu mempertahankan kelembapan mikro, sehingga memperlambat proses pelapukan kimia yang biasanya dipicu oleh perubahan ekstrem antara kondisi basah dan kering. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari China Agricultural University menganalisis

enam lokasi sepanjang sekitar 600 kilometer bentangan Tembok Besar yang berada di zona iklim arid dan semi-arid. Dengan metode analisis mikrobioma modern, peneliti membandingkan bagian tembok yang tertutup biokrust dengan bagian tembok yang terbuka.

Hasilnya menunjukkan bahwa area yang memiliki biokrust mendukung kelimpahan dan keanekaragaman mikroba 12–62 persen lebih tinggi. Selain itu, kompleksitas jaringan interaksi mikroba yang lebih stabil. Kemudian peningkatan gen fungsional tahan stres sebesar 4–15 persen.

Gen-gen tahan stres ini berperan penting dalam menghadapi kondisi ekstrem seperti radiasi ultraviolet, kekeringan, dan suhu tinggi—faktor utama penyebab degradasi bangunan di wilayah gurun. Secara bersamaan, biokrust juga menekan jalur metabolisme mikroba yang berpotensi merusak struktur, seperti produksi asam yang dapat mempercepat pelapukan material mineral.

Secara geologis, bangunan tanah dan batu mengalami kerusakan melalui dua mekanisme utama. Pertama, pelapukan fisik, akibat perubahan suhu dan tekanan. Dan kedua pelapukan kimia, akibat reaksi air, oksigen, dan zat asam.

Biokrust berperan menghambat keduanya. Lapisan mikroba mengurangi kontak langsung antara permukaan tembok dan faktor lingkungan, sekaligus menstabilkan suhu mikro di permukaan. Dengan demikian, laju

pelapukan dapat ditekan dalam jangka panjang. Inilah sebabnya para ilmuwan menilai biokrust sebagai agen konservasi alami, bukan sebagai organisme perusak seperti yang selama ini diasumsikan dalam praktik restorasi konvensional.

Teknologi Material Dinasti Ming

Penemuan biologis ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan hasil eksplorasi arkeologi terbaru pada menara pengawas Tembok Besar era Dinasti Ming (abad ke-14 hingga ke-17). Arkeolog menemukan meriam besi bertanggal 1632, lengkap dengan inskripsi manufaktur. Bukti adopsi desain meriam bergaya Eropa (Hongyipao). Kemudian, bata dengan spesifikasi teknis tertulis.

Selain itu, adukan kapur berbahan magnesium tinggi yang diperkuat serat tanaman. Dari sudut pandang ilmu material, campuran kapur dan serat organik ini meningkatkan kekuatan tarik dan daya rekat, sekaligus membuat struktur lebih tahan terhadap retakan mikro.

Selain struktur dan senjata, penggalian juga mengungkap sisa tanaman pangan, tanaman obat, tulang hewan, serta artefak batu pirus yang berasal dari berbagai wilayah China. Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan Tembok Besar bukan sekadar zona militer, melainkan ruang hidup yang kompleks secara ekologis dan sosial. Prasasti pada bata yang merekam keluh kesah pekerja pembangunan tembok menjadi bukti bahwa proyek ini melibatkan ribuan manusia dengan dinamika psikologis dan fisik yang berat, faktor yang kini turut dipelajari dalam kajian arkeologi manusiawi. (Ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Catat! Risiko Pakai Peeling Serum Siang Hari

Masih banyak orang yang belum menyadari bahwa produk eksfoliasi memiliki aturan pemakaian tertentu, termasuk soal waktu penggunaan. Kekeliruan sederhana seperti memakai peeling serum pada siang hari dapat membuat kulit menjadi lebih rentan dan meningkatkan risiko munculnya berbagai masalah kulit dalam jangka panjang.

Skincare Educator dr. Giovanni Mustopo menegaskan bahwa meskipun eksfoliasi memiliki banyak manfaat bagi kulit, langkah ini tetap harus dilakukan secara bijak. Jika dilakukan tanpa kehati-hatian, eksfoliasi justru berpotensi menimbulkan kerusakan pada kulit.

Giovanni menjelaskan bahwa tujuan eksfoliasi adalah memperbaiki tekstur kulit dan membuat wajah tampak lebih cerah. Namun, di sisi lain, proses ini membuat lapisan kulit menjadi sementara lebih tipis karena sel-sel kulit mati diangkat dari permukaan. Kondisi tersebut menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif, terutama saat terpapar sinar matahari.

Karena itu, penggunaan peeling serum tidak dianjurkan dilakukan pada siang hari, khususnya ketika intensitas sinar ultraviolet sedang tinggi. Ia mengingatkan bahwa eksfoliasi sebaiknya dilakukan pada malam hari dan dimulai dengan frekuensi yang rendah, terutama bagi pemula.

Eksfoliasi di siang hari bukan hanya meningkatkan risiko kulit

menjadi kemerahan, tetapi juga membuat kulit lebih rentan mengalami hiperpigmentasi. Dalam kondisi tertentu, flek hitam dapat muncul lebih cepat dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama.

Giovanni menekankan bahwa pemakaian peeling serum pada siang hari sangat tidak disarankan karena dapat memicu berbagai permasalahan kulit baru. Paparan sinar matahari dapat memperparah sensitivitas yang muncul akibat kandungan aktif dalam produk eksfoliasi.

Jika tetap digunakan pada siang hari, kulit bisa menjadi jauh lebih sensitif, sehingga memicu munculnya flek dan gangguan kulit lainnya.

Flek yang timbul dapat berupa noda kecekatan hingga hiperpigmentasi pascainflamasi. Dalam beberapa kasus, kulit juga bisa mengalami perubahan tekstur, menjadi lebih mudah teriritasi, atau terlihat kusam meskipun sudah menggunakan produk pencerah.

Peeling serum bekerja dengan cara membantu meluruhkan sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit sehingga proses regenerasi sel dapat berlangsung lebih optimal. Penumpukan sel kulit mati kerap membuat wajah terlihat kusam, tekstur tidak merata, serta menyamarkan kilau alami kulit. Dengan eksfoliasi kimia dari peeling serum, lapisan kulit terluar dibersihkan secara bertahap tanpa perlu digosok, sehingga kulit tampak lebih segar dan bersih.

Pada pemakaian awal, beberapa reaksi mungkin muncul sebagai tanda bahwa kulit sedang beradaptasi. Giovanni menjelaskan bahwa saat produk diaplikasikan, sel kulit mati maupun flek yang selama ini menumpuk mulai terangkat perlahan. Proses ini memungkinkan bahan aktif bekerja lebih efektif sekaligus membantu penyerapan produk perawatan

selanjutnya. Sensasi ceket-cekik ringan sering kali dirasakan di awal pemakaian. Hal ini menandakan bahwa kandungan bahan aktif seperti AHA, BHA, PHA, atau LHA sedang bekerja menembus lapisan kulit untuk mempercepat proses eksfoliasi. Sensasi tersebut tergolong normal selama tidak disertai rasa panas berlebihan, perih yang intens, atau iritasi berkepanjangan. Jika muncul reaksi yang tidak wajar, penggunaan sebaiknya dihentikan sementara.

Agar penggunaan peeling serum tetap aman dan efektif, Giovanni mengingatkan pentingnya penggunaan pelembap setelah proses eksfoliasi. Pelembap berfungsi menenangkan kulit, mengunci kelembapan, serta membantu memperbaiki skin barrier yang mungkin melemah setelah pengelupasan. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan lebih cepat pulih dan terasa lebih nyaman.

Ia juga menyarankan agar peeling serum tidak dikombinasikan dengan bahan aktif lain yang bersifat kuat. Setelah eksfoliasi, pengguna sebaiknya menghindari produk yang mengandung retinol, vitamin C dengan kadar tinggi, maupun eksfolian

lainnya. Kombinasi bahan-bahan tersebut dapat meningkatkan risiko iritasi, membuat kulit terasa perih, dan memperparah sensitivitas, terutama pada kulit yang belum terbiasa.

Eksfoliasi paling ideal dilakukan pada malam hari. Pada waktu ini, kulit tidak terpapar sinar matahari sehingga memiliki kesempatan lebih besar untuk beristirahat dan memperbaiki diri secara alami. Pada keesokan harinya, penggunaan tabir surya menjadi langkah penting untuk melindungi kulit yang baru tereksfoliasi dari paparan sinar UV.

Frekuensi penggunaan peeling serum juga perlu diperhatikan. Bagi pemula, eksfoliasi disarankan dilakukan satu hingga dua kali seminggu terlebih dahulu. Setelah kulit menunjukkan toleransi yang baik, intensitas dapat ditingkatkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi kulit masing-masing.

Meski memiliki batasan waktu pemakaian, eksfoliasi dengan peeling serum tetap merupakan bagian penting dari rutinitas perawatan kulit. Jika dilakukan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai aturan, peeling serum dapat membantu kulit menjadi lebih halus, cerah, serta tampak lebih bersih dari flek dan sel kulit mati. (ist/dya)

Langkah-langkah Penggunaan Peeling Serum yang Tepat

Bersihkan Wajah :

Cuci muka dengan gentle cleanser dan tunggu hingga kering .

Aplikasikan Serum:

Teteskan 2-3 tetes serum dan ratakan ke seluruh wajah..

Perhatikan Durasi:

Ikuti instruksi produk. Ada yang didiamkan 1-5 menit (lalu bilas).

Bilas (Jika Perlu):

Bilas dengan air hangat jika produknya jenis yang harus dibilas.



Bola Panas Upah ...dari hal 1

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menginstruksikan para gubernur serta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk segera menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah masing-masing.

Menurut Yassierli, pengumuman resmi besaran UMP kepada publik wajib dilakukan paling lambat pada 24 Desember 2025.

Ia menjelaskan bahwa Dewan Pengupahan Daerah akan menyampaikan rekomendasi nilai upah kepada pimpinan daerah, yang selanjutnya ditetapkan oleh gubernur. "Dewan Pengupahan Daerah akan mengusulkan kepada pimpinan daerah masing-masing untuk kemudian ditetapkan oleh gubernur. Batas waktunya tanggal 24 Desember 2025," ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Selain menetapkan UMP, gubernur juga diwajibkan menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta memiliki kewenangan untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yassierli menyatakan optimisme bahwa para kepala daerah mampu menuntaskan penetapan upah minimum dalam waktu sekitar satu pekan. Hal tersebut didukung oleh penggunaan formula penetapan upah yang pada prinsipnya sama dengan ketentuan sebelumnya.

Formula yang digunakan dalam penentuan upah minimum adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi × Alfa), dengan rentang nilai Alfa sebesar 0,5 hingga 0,9 poin. Rentang tersebut mengalami peningkatan dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya berada pada kisaran 0,1 hingga 0,3 poin.

"Jadi hanya Alfa-nya yang berbeda," jelas Yassierli.

Untuk memastikan penetapan UMP berjalan tepat waktu, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pendampingan terhadap sejumlah provinsi yang dinilai membutuhkan bantuan teknis dalam menentukan besaran upah minimum.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memfasilitasi sosialisasi kebijakan penetapan UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan kepada seluruh kepala daerah. Kegiatan sosialisasi tersebut tidak hanya dihadiri oleh para gubernur, tetapi juga melibatkan kepala dinas ketenagakerjaan di masing-masing daerah. "Forum itu sangat penting bagi kami," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) terkait



kenaikan upah minimum yang mengatur formula baru, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan Alfa dengan rentang 0,5–0,9 poin.

Ketentuan terbaru ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yang tertuang dalam PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP tersebut, nilai Alfa ditetapkan pada kisaran 0,1–0,3 poin. Dengan diberlakukannya aturan baru, rentang Alfa resmi dinaikkan menjadi 0,5–0,9 poin.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pihak terkait di daerah agar menjalankan tugas dan perannya dalam penetapan kenaikan upah minimum tahun 2026.

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring, Jakarta, Rabu

(17/12/2025).

Dalam sosialisasi itu, Tito Karnavian pun mengingatkan, gubernur memegang peran sentral dalam penetapan upah minimum tahun 2026. Baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sebab, tambahnya, sesuai dengan ketentuan Prabowo dalam PP itu, selain berkewajiban menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2026, gubernur juga dapat menetapkan UMK dan UMSK.

"Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota," kata Tito.

Tito mengingatkan agar proses penetapan kenaikan upah minimum tahun 2026 berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan kondusif di daerah.

Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari sebelum tenggat penetapan kenaikan upah minimum tahun 2026, Tito meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius dan terkoordinasi.

"Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember," tegasnya.

"Penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Dalam mekanismenya, Dewan Pengupahan menentukan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah. Jadi nilai alfa nanti yang 0,5 sampai 0,9," sambung Tito.

Penetapan kenaikan upah minimum, cetusnya, harus mengedepankan prinsip keseimbangan. Yaitu, melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha.

"Untuk itu, komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dinilai menjadi kunci agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak," katanya.

"Perangkat daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Langkah tersebut penting guna memastikan proses penetapan upah minimum berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat," tegas Tito. (wid,ant,kcm,rls/dya)

Belum Diketok tapi Pengusaha Sudah Minta Penangguhan

Pelaku usaha kembali menyoroti tantangan ekonomi yang masih membayangi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Ketidakpastian global dan tekanan domestik dinilai belum sepenuhnya mereda, sehingga kebijakan pengupahan perlu dihitung secara cermat. Pengusaha mengingatkan agar keputusan UMP tidak justru mempersempit ruang gerak dunia usaha ke depan.

"Ya, kalau kita memang melihat bahwa ekonomi kita saat ini kan juga memang masih belum pulih, daya beli masyarakat kita juga masih belum normal. Artinya memang tekanan ekonomi kita kan masih tinggi, terutama ya kita lihat bagaimana situasi ekonomi global, kemudian juga geopolitik, perang dagang, ini kan masih belum semua kan masih belum ada kepastian gitu loh, masih berproses dalam hal ini, sehingga memang ini tantangan ekonomi kita," Wakil Ketua Umum

Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang, Rabu (17/12/2025).

Dalam situasi tersebut, pengusaha menilai kebijakan pengupahan tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi yang lebih luas. Kenaikan UMP diharapkan mempertimbangkan tantangan yang sedang dihadapi pelaku usaha. Penyesuaian upah perlu sejalan dengan kemampuan riil perusahaan agar tetap berkelanjutan.

"Kami kan selalu berharap bahwa kenaikan UMP itu kan harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi perekonomian kita, hambatan dan tantangan kita, dan bagaimana supaya kenaikan UMP itu juga disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha dalam hal ini," ujar Sarman.

Meski demikian, kalangan pengusaha menegaskan tetap akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) tentang

pengupahan dipandang sebagai dasar hukum yang harus dijalankan. Namun, mekanisme penangguhan tetap dianggap penting bagi perusahaan yang belum mampu membayar upah sesuai ketentuan pemerintah.

"Nah, menyangkut rumus yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP ini, nah tentu ya kami dari pengusaha akan tetap pada posisi yang siap akan menjalankannya. Dan ya tentu bagi pengusaha-pengusaha yang tidak mampu, mereka kan masih punya kesempatan untuk mengajukan penangguhan dalam hal ini apabila memang kenaikan UMP itu sangat memberatkan dalam hal ini," pungkas Sarman.

Penangguhan disebut sebagai jalan terakhir bagi dunia usaha yang benar-benar terdampak. Dengan mekanisme tersebut, pengusaha berharap kebijakan UMP tetap berjalan tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja. (cnbc,ist/dya)

MK AKHIRI POLEMIC ROYALTY LAGU: PENYELENGGARA PERTUNJUKAN YANG WAJIB BAYAR

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengakhiri polemik panjang soal royalti musik dengan menegaskan bahwa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya secara komersial dalam suatu pertunjukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara acara. Putusan ini sekaligus memberi kepastian hukum bagi musisi, penyanyi, dan pelaku seni yang selama ini berada dalam bayang-bayang ancaman pidana akibat sengketa royalti.



Marcell Siahaan dan Armand Maulana, dalam sidang pembacaan putusan terkait royalti musik, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (17/12/2025). (dok.mk)

POIN-POIN PENTING PUTUSAN MK SOAL ROYALTY MUSIK

- 1. Penyelenggara Acara Wajib Bayar Royalti**
Royalti penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara. Bukan kewajiban penyanyi atau musisi yang tampil
- 2. Pembayaran Lewat LMK**
Royalti dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Jika pencipta tidak tergabung LMK, pembayaran bisa dilakukan secara langsung
- 3. Penyanyi Tak Perlu Minta Izin Pencipta**
Penyanyi boleh membawakan lagu tanpa izin langsung pencipta. Syaratnya, royalti dibayarkan sesuai aturan
- 4. Royalti Tak Boleh Ditentukan Sepihak**
Besaran "imbalan yang wajar" harus sesuai mekanisme dan tarif resmi. Tidak boleh ditetapkan sepihak oleh pihak mana pun
- 5. Pidana Jadi Upaya Terakhir**
Sengketa royalti didahulukan administratif dan perdata. Pidana hanya diterapkan jika semua upaya lain gagal (ultimatum remedium)
- 6. Wajib Restorative Justice**
Jika masuk pidana, keadilan restoratif harus diutamakan. Tidak boleh langsung memidanakan pelaku seni

ranah pidana. Pendekatan pidana ditegaskan sebagai jalan terakhir atau ultimatum remedium, setelah upaya administratif dan perdata ditempuh. Bahkan, jika pidana akhirnya digunakan, mekanisme keadilan restoratif wajib didahulukan.

Putusan ini merupakan hasil pengabulan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diajukan oleh 29 musisi, di antaranya Armand Maulana, Ariel NOAH, Bunga Citra Lestari, Raisa, Judika, Rossa, Titi DJ, hingga Nadin Amizah, yang tergabung dalam Gerakan Satu Visi atau Vibrasi Suara Indonesia (VISI). Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.

Dalam amar putusannya, MK memberikan tafsir konstitusional baru terhadap sejumlah pasal krusial dalam UU Hak Cipta, yakni Pasal 23 Ayat (5), Pasal 87 Ayat (1), serta Pasal 113 Ayat (2). Mahkamah menilai ketiga pasal tersebut menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum yang berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil serta rasa aman sebagaimana dijamin UUD 1945.

Frasa "setiap orang" dalam Pasal 23 Ayat (5) dinilai terlalu luas karena dapat menjerat siapa saja, termasuk penyanyi atau pelaku pertunjukan. MK menegaskan bahwa frasa tersebut harus dimaknai mencakup penyelenggara pertunjukan komersial, karena pihak inilah yang mengetahui secara rinci nilai keuntungan acara, terutama dari penjualan tiket.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa pihak yang paling tepat dibebani

kewajiban membayar royalti adalah penyelenggara acara, bukan penyanyi atau musisi yang tampil. Hal yang sama berlaku untuk pembayaran royalti secara langsung kepada pencipta yang tidak memberikan kuasa kepada LMK.

Sementara itu, frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 Ayat (1) juga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. MK menegaskan bahwa besaran royalti tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan harus mengacu pada mekanisme dan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan oleh instansi berwenang.

Penetapan tersebut juga harus mempertimbangkan kepentingan publik agar masyarakat tetap dapat

menikmati karya seni secara mudah dan terjangkau.

Pidana Bukan Jalan Utama

Terkait sanksi pidana dalam Pasal 113 Ayat (2), MK menilai pendekatan pidana tidak boleh menjadi langkah pertama dalam penyelesaian sengketa royalti. Pelanggaran hak ekonomi pencipta harus lebih dulu diselesaikan melalui sanksi administratif atau gugatan perdata.

"Penerapan pidana sebagai upaya awal justru berpotensi menimbulkan rasa takut bagi seniman, musisi, dan pelaku pertunjukan untuk berkarya dan tampil di ruang publik. Hal ini dapat berdampak buruk pada ekosistem seni dan budaya nasional," ujar Enny.

